

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian pustaka

Dalam Kajian Pustaka memuat penelitian-penelitian terkait yang telah dilakukan oleh para peneliti lain sebelumnya, dan memuat permasalahan terkait yang telah dilakukan analisis mendalam baik melalui jurnal ataupun skripsi.

Mulyadi (2017) melakukan penelitian tentang “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kota semarang” pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Data sekunder yang digunakan bersumber dari Bada Pusat Statistik (BPS) kota semarang dari tahun 1996-2015. Teknik analisis data yang digunakan adalah *time series* dengan model analisis regresi linear berganda metode yang dipilih estimasi *ordinary least square* (OLS). Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi tidak berpengaruh positif yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Eko wicaksono (2013) melakukan penelitian terkait ”analisis pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhi (kabupaten/kota di provinsi Jawa

Tengah)” pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Data sekunder yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dengan variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi serta variabel independen yaitu aglomerasi, investasi, angkatan kerja serta *human capital investment*.

Teknik analisa data yang digunakan adalah *time series* dengan model analisis regresi metode *pooled least square* (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi dan angkatan kerja memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, *human capital investment* memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan dan yang terakhir aglomerasi tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Efrizal Hasan, Syamsul Amar, dan Ali Anis (2011) melakukan penelitian tentang ”pengaruh investasi, angkatan kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat” pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Data sekunder yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat dengan variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi serta variabel independen yaitu investasi, angkatan kerja, dan pengeluaran pemerintah. Teknik analisa data yang digunakan adalah *time series* dengan model analisis regresi linear berganda metode yang dipilih *estimasi ordinary least square* (OLS).

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa investasi, angkatan kerja, dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Barat.

Alfian Wahyu Fauzan (2015) melakukan penelitian tentang analisis pengaruh investasi, Tenaga Kerja, dan Tingkat Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah 2009-2013. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Data sekunder yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dengan variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi serta variabel independen yaitu investasi, tenaga kerja, dan tingkat pendidikan. Teknik analisa yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah investasi, tenaga kerja, dan tingkat pendidikan signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Sukirno (2011) mendefinisikan Pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan PDB riil, yaitu kegiatan ekonomi yang meningkatkan produksi barang dan jasa hal ini diperkuat dengan analisa ahli-ahli ekonomi bahwa kekayaan sumber daya alam, barang-barang modal yang tersedia, kuantitas dan kualitas tenaga kerja, teknologi serta respon masyarakat merupakan faktor utama yang mempengaruhi kenaikan PDB riil.

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi David Ricardo dan T.R Malthus

Teori pertumbuhan Ricardo menjelaskan bahwa Jumlah tenaga kerja dapat melimpah jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi disuatu Negara mengalami peningkatan yang relatif besar, pendapat ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan Malthus yaitu Hasil produksi akan mengalami peningkatan dengan deret hitung sedangkan populasi penduduk akan mengalami peningkatan dengan deret ukur.

Asumsi yang dikemukakan oleh Ricardo antara lain yaitu :

1. Tenaga kerja akan mengalami peningkatan atau penurunan tergantung pada tingkat upah nominal. Tingkat penawaran atas tenaga kerja akan mendorong tingkat upah sehingga mengalami kenaikan sampai tingkat upah alamiah hal ini terjadi karena tenaga kerja yang dipekerjakan menerima tingkat upah diatas tingkat upah alamiah dan jumlah tenaga kerja akan terus bertambah tetapi jika tingkat upah nominal turun sampai tingkat alamiah, jumlah tenaga kerja akan mengalami penurunan.
2. Jumlah lahan yang terbatas. Lahan yang terbatas akan menyebabkan turunnya produk marginal yang dikenal dengan istilah *The Law of Diminishing Return* yaitu kenaikan hasil yang semakin berkurang.
3. Akumulasi modal akan terjadi jika keuntungan yang didapatkan oleh pemilik modal diatas tingkat keuntungan minimum yang ada sehingga dapat menarik investasi.
4. Kemajuan teknologi terjadi sepanjang waktu;

5. Sektor pertanian memiliki peran yang sangat dominan, (Arsyad,2010).

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik.

Teori Pertumbuhan Ekonomi klasik menjelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu penambahan penduduk dengan asumsi faktor lainnya tetap. Pada awalnya teori ekonomi klasik menggambarkan penduduk yang masih sedikit dalam suatu negara dan kekayaan yang melimpah menyebabkan pengembalian modal dari suatu investasi menjadi tinggi membuat para pengusaha mendapatkan keuntungan yang besar. Peristiwa ini menyebabkan munculnya investasi baru dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi,tetapi keadaan ini tidak berlangsung dalam jangka panjang. Jika penduduk disuatu negara sudah terlalu banyak akan menurunkan tingkat aktivitas ekonomi disebabkan karena produktivitas marginal menjadi negatif dan kesejahteraan masyarakat menjadi daerah. Keadaan ini membuat stagnasi pada perekonomian.

Ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith,David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus (1981) masyarakat tidak akan mampu menghalangi terjadinya stagnasi pada perekonomian tersebut.

3. Teori Agregat Demand

Teori ini menghubungkan Investasi dengan perhitungan pendapat nasional dengan pendekatan :

$$Y= C + I + G+ (X-M)$$

Pendekatan yang dikenal sebagai perhitungan pendapatan nasional (Y) ini menyatakan variabel C menyatakan tingkat konsumsi masyarakat, I menyatakan investasi, G menyatakan pengeluaran pemerintah, dan $(X-M)$ menyatakan net ekspor. Untuk mengetahui kontribusi Investasi dalam pembentukan pendapatan nasional dapat membandingkan nilai I terhadap Y sehingga dapat dilakukan analisis seberapa penting peran Investasi dalam kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

4. Teori Investasi Daerah

Teori ini menjelaskan investasi sebagai pemberian sejumlah modal kepada orang lain untuk dipergunakan dan dikembangkan dalam aktivitas ekonomi dimana hasil dari pemberian tersebut akan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan antar pihak. Menurut pakar ekonomi investasi dapat didefinisikan sebagai pengeluaran penanam modal untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi guna untuk melancarkan dan menambah kemampuan produksi barang dan jasa dalam perekonomian.

Investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Perekonomian di suatu daerah.
2. Lingkungan usaha yang produktif.
3. Ketenagaerjaan dan sumber daya manusia di daerah.
4. Sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur.
5. Lembaga keuangan dan perbankan.

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah

UU No.33 Tahun 2004 bab V (lima) nomor 1 (satu) yaitu tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, menetapkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terpisah dari Pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah yakni pendapatan yang diperoleh dan dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

1. Pajak Daerah

Menurut Yovi (2011) mendefinisikan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh pribadi atau badan pemerintahan tanpa imbalan langsung yang diterima, dapat dipaksakan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang tersedia dan digunakan untuk pembiayaan aktivitas ekonomi pembangunan daerah. Menurut UU No.34 Tahun 2000 terkait dengan pendapatan pajak yang berbeda bagi provinsi dan kabupaten. Jenis pendapat pajak Provinsi terdiri dari :

1. Bea balik nama kendaraan bermotor
2. Pajak kendaraan bermotor serta Bahan Bakarnya
3. Pajak air permukaan dan dibawah tanah
4. Pajak Kendaraan diatas air

Menurut Halim (2007) Jenis pendapatan Pajak Kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pajak Restoran, Hotel, dan Parkir.
2. Pajak Hiburan.
3. Pajak reklame serta penerangan Jalan.

4. Pajak pengambilan bahan galian golongan C.

2. Retribusi Daerah

Penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran dan mendapatkan imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan daerah kepada masyarakatnya adalah Retribusi Daerah. UU No.18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan bahwa retribusi daerah sebagai pungutan daerah secara resmi yang diberikan izin oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi maupun badan.

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Retribusi daerah yang dipungut mengelompokkan retribusi ke dalam 3 golongan, yaitu Retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

1. Retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan, badan, dan umum.
2. Retribusi jasa usaha merupakan pungutan daerah sebagai pelayanan yang diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan maupun badan.
3. Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan daerah sebagai pelayanan yang diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan maupun badan.

Menurut Yovita (2011) besarnya tarif distribusi bersifat fleksibel ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh masyarakat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, yang menjadi masalahnya adalah penentuan berapa besar manfaat

yang diterima oleh masyarakat yang membayar retribusi tersebut serta penentuan berapa besar tarif retribusi yang harus dibayarkan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan

Penerimaan daerah atas keuntungan atau laba bersih dari suatu perusahaan terdiri dari hasil penjualan asset tetap dan jasa giro. Menurut Damang (2011) Perusahaan daerah dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan daerah, tapi tujuan utama dari perusahaan daerah bukanlah untuk mencari *profit* akan tetapi memberikan pelayanan jasa yang terbaik dalam memberikan manfaat umum, sehingga perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda secara seimbang yaitu fungsi sosial dan ekonomi. Pemenuhan fungsi sosial dapat berjalan seiringan dengan fungsi ekonomi apabila terwujudnya profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dirinci mencakup bagian laba, deviden serta penjualan saham milik daerah (Widjaja, 2007).

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerahh Yang Sah Meliputi:

Undang Undang Pasal 6 Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi:

1. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Dividen
4. Keuntungan nilai tukar rupiah terhadap nilai tukar asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk yang lainnya akibat dari penjualan dan pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

2.2.3 Tenaga Kerja

BPS mendefinisikan pendudukan yaitu semua elemen masyarakat yang bersada diwilayah geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kurun waktu 6 bulan, kurang dari 6 bulan, lebih dari 6 bulan, dan yang kurang dari 6 bulan tetapi yang memiliki tujuan untuk menetap di Republik Indonesia.penduduk pada tingkat usia kerja tergolong menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk dalam golongan angkatan kerja yaitu penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih yang bekerja penuh, bekerja sementara, dan tidak bekerja. Penduduk dalam golongan bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang masih menjalani pendidikan, ibu rumah tangga, lansia, dan pensiunan. Jumlah tenaga kerja dapat dijadikan sebagai acuan pemerintah untuk mengidentifikasi jumlah lapangan kerja yang tersedia, semakin banyak jumlah angkatan kerja maka akan membutuhkan lapangan kerja yang banyak. Dengan diciptakannya lapangan kerja yang banyak maka akan mengurangi tingkat pengangguran yang terjadiserta meningkatkan total produksi disuatu daerah.

Keberhasilan pembangunan ekonomi sangat tergantung pada tenaga kerja yang dapat menjalankannya. Terdapat beberapa faktor dalam ilmu ekonomi yang membahas tentang sumber daya manusia, yaitu:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan tenaga kerja.
3. Pasar kerja dimana terjadi proses pertemuan antara permintaan dan penawarn tenaga kerja.

2.2.4 PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)

Menurut UU No.6 Tahun 1968 tentang PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) sebagaimana yang telah diubah dan direvisi oleh UU No.12 Tahun 1970 pasal 1 ayat 2 yang mendefinisikan Penanaman Modal Dalam Negeri sebagai aktivitas ekonomi dengan menanamkan modal diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana sumber penanaman modal sepenuhnya berasal dari dalam negeri dan dilakukan oleh penanam modal dalam negeri.

Penanam modal dalam negeri digolongkan menjadi 3, yaitu perseorangan warga Negara Indonesia, Badan usaha Indonesia, dan Badan hukum Indonesia.

Penanaman Modal Dalam Negeri mendatangkan keuntungan bagi perekonomian Indonesia khususnya, dapat membuka kesempatan kerja dan menyerap tenaga kerja lebih banyak, mengolah ekonomi potensial di Negara dengan modal yang berasal dari dalam negeri untuk menjalankan aktivitas ekonomi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

2.2.5 Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK)

Upah atau yang biasa dikenal dengan kata gaji merupakan salah satu sumber dari penghasilan masyarakat. Masyarakat yang bekerjaguna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 30 Ayat 1 telah mendefinisikan upah sebagai hak para pekerja dan buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai balasan dari aktivitas usaha atau kerja yang dilakukannya bagi

perusahaan. Menurut Sulistiawati (2012) pemberian upah diberikan dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Biaya keperluan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum pekerja dan keluarganya.
2. Sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan terkait dengan upah minimum pekerja.
3. Produktivitas dan kualitas yang dimiliki pekerja.
4. Tekanan yang ditimbulkan dari serikat pengusaha maupun serikat buruh
5. Perbedaan Sub jenis pekerjaan yang dilakukan.

Menurut BPS, Upah di bedakan menjadi dua yaitu:

- a. Upah nominal yaitu upah atas balas jasa pekerjaan yang dilakukan oleh para buruh.
- b. Upah riil yaitu upah yang diterima para buruh dari aktivitas usahanya dimana besarnya dihitung dari nilai upah nominal dibagi dengan indeks harga konsumen (IHK).

Menurut Sumarsono (2003) Pembagian upah di Indonesia dibagi menjadi tiga fungsi, yaitu:

- a. Untuk menjamin kehidupan yang layak dan bercukupan bagi para pekerja dan keluarganya.
- b. Untuk menggambarkan hasil dari sumbangsih aktivitas seseorang dalam perusahaan.
- c. Untuk mendorong serta meningkatkan produktifitas para pekerja.

Penerapan Kebijakan upah minimum di Indonesia ditetapkan untuk mengimbangi antara kesejahteraan para pekerja dan pengusaha.

Upah minimum dibagi menjadi 4 jenis yaitu:

- a. Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah tingkat upah minimum yang di berlakukan bagi seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.
- b. Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) adalah tingkat upah minimum yang di berlakukan bagi kabupaten/kota di suatu wilayah.
- c. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMPS) adalah tingkat upah minimum yang di berlakukan bagi wilayah kabupaten/kota di suatu provinsi secara sektoral.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah Dengan PDRB

Pemerintah daerah sangat diharapkan dapat menggali potensi keuangan khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah guna terwujudnya desentralisasi fiskal yang berujung terciptanya kemandirian keuangan daerah (Sidik,2002).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi dapat berdampak pada kenaikan pendapatan perkapita dan berujung pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif, (Harianto dan Adi,2007).

Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan dalam beberapa sub yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah.Sub pembagian PAD,jika menunjukkan

tingkat kontribusi yang besar dan tinggi mencerminkan tingkat kontribusi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Semakin tinggi angka Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kemandirian daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki serta sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada periode tertentu.

2.3.2 Hubungan Tenaga Kerja Dengan PDRB

PDRB bernilai positif akibat dari pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja yang bekerja mengalami peningkatan (Todaro, 2003). Peran tenaga kerja yang berkualitas dapat meningkatkan penghasilannya melalui jenjang pendidikan yang telah ditempuhnya semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang sangat diharapkan semakin tinggi pula penghasilan yang diterimanya dan membawa dampak positif terhadap perekonomian (Teori Human Capital). Modal Sumber Daya Manusia dipandang sebagai mesin pertumbuhan utama sebagai penggerak dan pendorong kenaikan PDRB dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sumber Daya Manusia merupakan kunci utama dalam sektor riset hingga ditemukannya pemikiran atau ide yang baru. Negara yang memiliki Modal Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan berujung pada pertumbuhan perekonomian yang lebih cepat dan tinggi. Pendidikan dan Keterampilan merupakan salah satu cara dimana dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Menurut Supartoyo (et al., 2013) Pendidikan memiliki hubungan berbanding lurus terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan implikasi dari Hubungan positif antara Modal Sumber Daya Manusia dengan pertumbuhan ekonomi.

2.3.3 Hubungan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dengan PDRB

Menurut Widjaya (2002) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah penggunaan Modal dalam bentuk aset yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha di dalam negeri baik secara langsung maupun tidak langsung. Modal Dalam Negeri yaitu aset yang dimiliki perseorang, swasta maupun Negara yang berada di wilayah Negara Indonesia. Tingkat Penanaman Modal Dalam Negeri yang tinggi sangat diharapkan akan mendorong output total pada PDRB dan pertumbuhan ekonomi dengan peran sektor swasta dan rumah tangga yang optimal dalam pengalokasian sumber daya yang tersedia. Peran sektor swasta dan rumah tangga yang optimal diharapkan dapat meningkatkan PDRB disuatu daerah sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah mengalami peningkatan.

Penanaman Modal Dalam Negeri memiliki hubungan korelasi yang positif terhadap PDRB yang terjadi di suatu daerah. Semakin besar Investasi dalam negeri dalam bentuk barang publik sangat diharapkan dapat mendorong peningkatan PDRB di suatu daerah melalui tingkat output yang tinggi dan berujung pada peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

2.3.4 Hubungan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) dengan PDRB

Upah merupakan salah satu sumber penghasilan para pekerja guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tingkat nilai upah minimum tiap kabupaten/kota memiliki taraf yang berbeda tergantung dari tarif biaya hidup standar di

kabupaten/kota dengan pertimbangan tingkat harga kebutuhan pokok daerah setempat, apabila kabupaten/kota memiliki tingkat upah minimum yang tinggi maka akan berdampak pada kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah tersebut dengan asumsi bahwa peningkatan upah minimum masyarakat akan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat setempat. Di sisi lain dengan peningkatan upah minimum dapat meningkatkan hasil produksi dari suatu perusahaan jika diikuti dengan kenaikan tingkat produktivitas sehingga akan berimbas pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah.

2.4 Hipotesis

Menurut Hasan (2008) Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan sementara atas suatu permasalahan atau suatu pernyataan yang masih perlu di buktikan lagi tentang kebenarannya dengan pengujian menggunakan data-data yang memiliki tingkat validitas cukup tinggi dan disinambungkan dengan hasil penelitian terkait yang telah dilakukan dahulu.

Penelitian ini menggunakan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat.
2. Diduga Tenaga Kerja berpengaruh positif terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat.
3. Diduga Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat.

4. Diduga Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) berpengaruh positif terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat.

